



## Banyak APBDes Tak Sesuai Prioritas Pembangunan ✓

**Tabanan (Bali Post) -**

Penyerapan anggaran dana desa sudah sampai pada level desa. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, kembali menekankan agar pengelolaan dan penggunaan Dana Desa diarahkan pada program prioritas seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, pembentukan PAUD, dan Poskesdes.

Akan tetapi di Kabupaten Tabanan, anggaran Dana Desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat lewat APBN ada yang telanjur dialirkan untuk biaya pembangunan kantor desa. Ini tidak dibolehkan, sehingga membuat bingung aparat desa setempat. Apalagi hal itu baru diketahui saat sosialisasi dana desa dengan Kemenkeu belum lama ini.

Ketua Forum Perbekel se-Kabupaten Tabanan I Made Arya saat dikonfirmasi, Senin (28/9) kemarin, mengakui dalam sosialisasi Dana Desa oleh Kementerian Keuangan ditekankan agar penggunaan dana desa diarahkan pada program prioritas untuk bisa memberikan pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat. Kalau pembangunan kantor desa diperlukan untuk bisa memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat, disarankan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten.

"Mungkin karena transisi, jadi

masih ada kebingungan menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam APBDes, harus menggunakan dana desa atau alokasi dana desa. Semestinya pendampingan ada sejak awal untuk teknis persiapan. Jika salah tentu akan mengganggu pelaksanaan dan evaluasi," ujar Arya.

Hal senada disampaikan Perbekel Marga, Ketut Budiarta. Di Kecamatan Marga saja setidaknya ada tiga desa yang sudah menggunakan dana desa untuk pembangunan kantor. "APBDes yang diajukan ke kabupaten sudah diverifikasi dan disetujui. Ada yang telanjur membangun dan ada juga yang baru beli besi," katanya.

Meski kementerian telah memberikan solusi agar desa yang telanjur menggunakan dana desa di luar program prioritas untuk segera mengubah APBdes, masih ada rasa kebingungan dari para perbekel dalam mengelola dana desa. Untuk itu, para perbekel akan meminta informasi tentang apa yang mesti dilakukan kepada instansi terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Pemerintah pusat setidaknya telah menyalurkan Dana Desa tahap I dan tahap II ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabanan Rp 29,66 miliar atau mencapai 80 persen. Sisanya akan disalurkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015. (kmb28)

Edisi : Selasa, 29 September 2015

Hal : 14



## Digelontor Rp 2 Miliar ✓ Pembangunan Pasar Kidul Dilanjutkan

**Bangli (Bali Post) -**

Pemkab Bangli kembali akan melanjutkan pembangunan Pasar Kidul yang terbakar beberapa tahun lalu. Dengan dana Rp 2,043 miliar yang dianggarkan dalam APBD Induk 2015, yang dikerjakan yakni pembangunan melingkar dalam selasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Bangli Nengah Subidia saat ditemui belum lama ini menjelaskan, proses pembangunan menggunakan APBD Induk itu memang telat cukup lama. Ini disebabkan lantaran adanya beberapa perubahan. Sebelum adanya kesepakatan damai antara pemkab dengan mantan pemegang SHGB, perencanaan bagian yang dikerjakan saat ini sebelumnya dibuat menyatu dengan ruko.

Namun, pascaadanya kesepakatan dengan mantan pemegang SHGB yang akan dikelola dengan sistem bangun guna serah (BGS), maka proses pembangunannya akhirnya dipisah. "Itu menjadi penyebab sehingga pembangunan pasar melingkar di selasar telat," terangnya.

Dikatakan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Kidul pemenang tendernya sudah ada. Dari hasil tender tersebut disepakati bahwa nilai kontraknya Rp 2 miliar lebih. Pembangunan melingkar dalam selasar akan dikerjakan selama 85 hari kalender. Sementara terkait pembangunan 43 ruko yang sempat menjadi objek sengketa, Sudibia menjelaskan dalam Perubahan APBD tahun ini pihaknya baru akan membuat *detail engineering design* (DED).

Karena kesepakatannya menggunakan sistem BGS, maka Pemkab Bangli selaku pemilik lahan hanya akan membuat perencanaan. Sedangkan pembangunan dilakukan pihak ketiga yang selanjutnya akan disewakan kepada pedagang tersebut. "Pemkab nantinya hanya melakukan MoU dengan pihak ketiga," jelasnya.

Namun jika pembangunan dengan sistem BGS ini terus berlarut-larut, sambil menyusun DED, pihaknya bakal terus berkomunikasi dengan pemilik ruko. Ditambahkan sesuai ketentuan, pedagang yang bakal menempati ruko tersebut tidak bisa langsung bertindak sebagai pihak ketiga karena harus melalui proses lelang. (kmb40)



Bali Post/dok

*Ruko Pasar Kidul*

Edisi : Selasa, 20 Sept 2015

Hal : 8



## Revisi UU Perimbangan Keuangan

# Draf Rekomendasi

# Masuk Tahap Finalisasi

### Mangupura (Bali Post) -

Draf rekomendasi revisi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini terungkap dalam rapat Pansus DPRD Bali terkait revisi Undang-undang Perimbangan Keuangan di gedung dewan, Senin (28/9) kemarin.

"Tadi (kemarin - red) rapat Pansus dengan tim ahli untuk finalisasi penyusunan pokok-pokok pikiran (draf rekomendasi - red) revisi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 64 Tahun 1958," jelas Koordinator Pansus I Nyoman Sugawa Korry usai rapat.

Dikatakannya, pokok-pokok pikiran untuk revisi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 itu meliputi pasal 1 terkait pengertian Sumber Daya Lainnya agar men-

cantumkan sektor pariwisata termasuk di dalamnya. Dengan demikian, Bali mendapat pembagian dana hasil dari sektor pariwisata. Selain itu, diusulkan revisi pasal 6 ayat (2), penambahan pasal 7A, pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), penambahan pasal 22A, perubahan pasal 13 dan lainnya. "Intinya, revisi hal yang mendesak mengingat dari kajian teori keadilan, desentralisasi, keberlakuan hukum dan konsep *good governance* Undang-undang

No. 33 Tahun 2004 sangat tidak adil untuk Bali sehingga sangat layak untuk direvisi," jelas Sugawa Korry.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, setelah rampung, draf rekomendasi akan segera dikirim ke anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Bali, Gubernur Bali, bupati/wali kota se-Bali serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali untuk diminta masukannya. Selama 10 hari setelah itu, pihaknya akan

mengundang seluruh komponen tersebut ke DPRD Bali. "Kami akan undang untuk diskusi penyempurnaan draf rekomendasinya. Hasil penyempurnaan itu akan dilaporkan ke paripurna DPRD Bali untuk ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD Bali. Selanjutnya, rekomendasi itu akan dibawa ke DPR-RI sebagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan," tandasnya. (kmb32)

Edisi : Selasa, 29 September 2015

Hal : 2



Taman Kota Dihiasi Pohon Kecil dan Jarang

# Dewan Pertanyakan

## Realisasi Anggaran

### Rp 3 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Usai proses revitalisasi selama beberapa bulan, Taman Kota Gianyar akhirnya diresmikan Senin (28/9) kemarin. Namun, realisasi pengerjaan taman yang digadang-gadang sebagai ikon kota lumbung seni ini, kini menjadi sorotan DPRD Gianyar. Pasalnya hingga peresmian kemarin, taman tersebut masih terlihat gersang, hanya dihiasi pohon-pohon kecil dan jarang. Hal ini langsung dipertanyakan oleh Komisi II DPRD Gianyar, sebab anggaran untuk revitalisasi taman tersebut mencapai kisaran Rp 3 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Gianyar, I Wayan Gde Sudartha, mengatakan, dari awal pengerjaan taman kota Gianyar ini, ia sudah beberapa kali turun melakukan pemantauan hingga saat percobaan air mancur. "Terakhir saya turun saat percobaan mesin air mancur. Saat itu saya sudah tanya kenapa gersang begini, pohonnya kecil-kecil dan jarang sekali. Tapi kata petugas, hasil ini sudah sesuai dengan gambar dari konsultan," ujarnya.

Dari jawaban tersebut hingga proses peresmian Senin kemarin, ia pun mempertanyakan realisasi dari anggaran yang mencapai Rp 3 miliar untuk revitalisasi taman Kota Gianyar itu. "Bukan hanya saya yang mempertanyakan realisasi dari anggaran Rp 3 miliar ini, tapi semua anggota di Komisi II dan dewan lainnya juga," ungkapnya.

Sudartha menegaskan, jajaran Komisi II DPRD Gianyar akan kembali melakukan pengecekan ke taman tersebut, untuk memastikan penggunaan anggaran yang mencapai tiga miliar rupiah. "Secepatnya, kami dari Komisi II akan turun mengecek kembali taman kota itu," tuturnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Gianyar, A.A. Agung Gede Wiramantra, membenarkan bahwa anggaran yang disetujui dewan Gianyar untuk revitalisasi taman kota tersebut mencapai kisaran tiga miliar rupiah. "Kalau rin-

ciannya semua data ada di kantor, tapi kisaran dana untuk taman kota memang mencapai tiga miliar," ujarnya.

Sementara itu terkait realisasi taman tersebut yang terlihat gersang dengan pohon yang kecil dan jarang, Agung Gede Wiramantra mengatakan meski sudah diresmikan taman tersebut masih akan melewati proses perawatan selama beberapa bulan. "Setelah peresmian ini masih ada garansi perawatan beberapa bulan. Yang jelas nanti kami cek sebelum serah terima antara pemkab dengan konsultan," ucapnya. (kmb35)

### Kontraktor Tidak Tahu

TERKAIT sorotan dewan terhadap realisasi anggaran revitalisasi taman kota sebesar Rp 3 miliar karena kondisi taman hanya dihiasi pohon-pohon kecil dan jarang, kontraktor pengerjaan Taman Kota Gianyar, Ketut Karnaya, saat dikonfirmasi via telepon tidak bersedia memberikan jawaban berapa persen pengerjaan taman sudah selesai. Meskipun Senin Kemarin sudah dilakukan peresmian. "Ya, memang saya yang memegang pengerjaan Taman Kota Gianyar, tetapi berapa persen pengerjaannya karyawan saya yang lebih tahu," ujarnya. (kmb35)

Edisi : Selasa, 29 September 2015

Hal : 9



## Terdakwa Tanpa Pengacara Sidang Terakhir Kasus IHDN Ditunda

### Denpasar (Bali Post) -

Sidang paling terakhir kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan terdakwa I Ketut Sukarsana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Senin (28/9) kemarin ditunda. Sidang tidak dilanjutkan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukanila lantaran terdakwa tidak didampingi penasihat hukum yang merupakan syarat wajib bagi terdakwa.

Dalam sidang kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) I Made Subawa yang diwakili Junaedi Tandi yang seharusnya membacakan dakwaan, menjadi tidak dilanjutkan. Karenanya, majelis hakim Sukanila bersama hakim anggota Sumali dan I Dewa Gede Suarditha memutuskan sidang ditunda. Jika terdakwa tidak mampu menunjuk pengacara, maka pengadilan akan menyiapkannya.

Sementara itu, sebagaimana diungkapkan jaksa Made Subawa ketika pelimpahan tahap kedua, beberapa waktu lalu, bahwa Sukarsana menjadi tersangka karena dalam persidangan perannya cukup besar. "Fakta pun banyak terung-

kap. Dengan demikian, ketika diperdalam hasil persidangan, kami menduga kuat Sukarsana memiliki keterlibatan cukup sehingga harus diangkat statusnya menjadi tersangka," ungkap Subawa.

Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Erna Normawati W.P. sempat memberikan pernyataan bahwa terdakwa tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di IHDN Denpasar sebesar Rp 24,9 miliar. Juga, terbukti tidak ada pelelangan atau tender, tetapi melalui penunjukan langsung oleh Dr. Praptini sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 4,8 miliar. "Dari pengembangan penyidikan dari kasus sebelumnya, ada satu yang juga terlibat adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni I Ketut Sukarsana," papar Erna ketika itu. Atas perbuatannya tersebut, Sukarsana dijerat primer Pasal 2 Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU. No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Pasal 1 ke-1 KUHP, dan subsider Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Pasal 1 ke-1 KUHP. (kmb)